

**KRITERIA DAN PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN MUTASI
DI KABUPATEN PURBALINGGA
(Studi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Purbalingga)**

Oleh :

RAHMA DWI SAFITRI

E1A016258

ABSTRAK

Mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bagian dari proses Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak terkecuali di Kabupaten Purbalingga. Dalam hal pelaksanaan mutasi jabatan struktural Eselon II ke bawah dalam satu Instansi Daerah di Kabupaten Purbalingga diindikasikan terjadi ketidakproporsionalan dalam hal pelaksanaannya sehingga terjadi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian dibutuhkan penilaian yang objektif berdasarkan kriteria dan prosedur yang tepat dalam pelaksanaan mutasi untuk mendukung hal tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria dan prosedur penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan mutasi di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan normative kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan mutasi jabatan struktural Eselon II ke bawah dalam satu Instansi Daerah di Kabupaten Purbalingga mempertimbangkan kriteria khusus dan kriteria umum berdasarkan sistem merit yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan non diskriminasi yang telah ditentukan oleh Baperjakat. Hasil temuan lain menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan mutasi jabatan struktural Eselon II ke bawah dalam satu Instansi Daerah di Kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, sedangkan prosedur penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci : Penilaian Kinerja, Mutasi, Pegawai Negeri Sipil

**CRITERIA AND PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES
OF CIVIL STATE EMPLOYEES IN IMPLEMENTING MUTATIONS
IN PURBALINGGA DISTRICT**

*(Study at the Regional Education and Training Personnel Agency of
Purbalingga Regency)*

By :

RAHMA DWI SAFITRI

E1A016358

ABSTRACT

Movement of Civil Servants is one part of the Civil Servant Management process, including in Purbalingga Regency. In the case of the implementation of mutations in the structural positions of Echelon II and below in one Regional Agency in Purbalingga Regency, it is indicated that there is a disproportionate in terms of its implementation so that there are positions that are not in accordance with the competencies they have. Thus, an objective assessment is needed based on appropriate criteria and procedures in implementing mutations to support this.

The problem in this research is how the criteria and procedures for evaluating the performance of civil servants in implementing mutations in Purbalingga Regency. The research method used in this research is a normative juridical approach. The data used are secondary data. The data obtained were analyzed and described based on legal norms related to the object of research. The research analysis was conducted using qualitative normative.

Based on the research results, the implementation of Echelon II structural position mutations below in one Regional Agency in Purbalingga Regency considers special criteria and general criteria based on the merit system, namely qualifications, competence, and performance in a fair, fair, and non-discriminatory manner as determined by Baperjakat. Other findings show that the procedure for implementing the mutation of Echelon II structural positions below in one Regional Agency in Purbalingga Regency refers to the State Civil Service Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Procedures for Implementing Mutations, while the procedure for assessing the performance of Civil Servants is still based on Government Regulation Number 46 of 2011 concerning Assessment of Work Performance of Civil Servants.

Keywords : Performance Appraisal, Movements, Civil Servants